

Peran Terminal Seruni Dalam Sistem Transportasi Perkotaan Kota Cilegon

Fitriyadi

Diterima : 18 Maret 2014

Disetujui : 8 Desember 2016

ABSTRACT

Cilegon is one of the National Activity Centre (PKN) in Banten Province. As PKN, Cilegon generate movement from out of town towards Cilegon, either using AKAP/AKDP buses and urban transportation from the place of origin. Many AKAP/AKDP bus passengers fell in the shadow of the terminal, while the urban transport passengers from the outside get into the city of Cilegon and drop off passengers. The number of outer urban transport operating in Cilegon Cilegon City area adds to congestion in Jalan Sultan and Jalan Ahmad Yani Ageng Tirtayasa, especially at rush hour. Therefore, the Government of Cilegon Municipality then implement the construction of Seruni Terminal, officially put into operation on April 1, 2013. With the expected Seruni terminal buses no longer drop off passengers at the terminal shadow, and urban transport outside the city of Cilegon not get into town. Positivistic approach and methods used in this study is a quantitative method, as well as some analysis used: (1) the analysis of the characteristics of Seruni Terminal, (2) analysis of traffic volume in Seruni Terminal, (3) analysis of urban transport route network in Cilegon, and (4) policy analysis for development of The Seruni Terminal, is expected to answer the research question, namely: "the role of Seruni Terminal in the urban transport system in Cilegon Municipality? The results obtained from this study is the lack of Seruni Terminal has a role in urban transport systems in Cilegon. To enhance the role, it's can be done with urban transport route A.01 Cilegon-Anyer and Merak-Cilegon M.01 directed toward Seruni Terminal, and/or the addition of a new trajectory Cilegon-JLS. Therefore, Seruni Terminal is expected to increase the role of the movement in serving urban communities in Cilegon.

Keywords : Terminals, Transportation, Route, Urban transport

ABSTRAK

Kota Cilegon merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Banten. Sebagai PKN, Kota Cilegon menghasilkan tarikan pergerakan dari luar kota menuju Kota Cilegon, baik menggunakan moda angkutan bus AKAP/AKDP maupun angkutan perkotaan dari tempat asal. Penumpang bus AKAP/AKDP banyak yang turun di terminal bayangan, sedangkan angkutan perkotaan dari luar Cilegon memasuki kota dan menurunkan penumpang di dalam kota Cilegon. Banyaknya angkutan perkotaan dari luar Kota Cilegon yang beroperasi di wilayah Kota Cilegon menambah kemacetan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, terutama pada jam-jam sibuk. Untuk mengatasi kemacetan tersebut, Pemerintah Kota Cilegon melaksanakan pembangunan Terminal Seruni yang secara resmi dioperasikan pada tanggal 1 April 2013. Dengan adanya Terminal Seruni diharapkan bus-bus tidak lagi menurunkan penumpang di terminal bayangan, dan angkutan perkotaan dari luar Kota Cilegon tidak masuk ke dalam kota. Dengan pendekatan positivistik dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, serta beberapa analisis yang digunakan: (1) analisis karakteristik Terminal Seruni, (2) analisis volume lalu-lintas di Terminal Seruni, (3) analisis jaringan trayek angkutan perkotaan Kota Cilegon, dan (4) analisis kebijakan pengembangan Terminal Seruni, diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yaitu: "bagaimana peran Terminal Seruni dalam sistem transportasi perkotaan di Kota Cilegon?" Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Terminal Seruni kurang memiliki peran dalam sistem transportasi perkotaan di Kota Cilegon. Untuk meningkatkan peran Terminal Seruni sebagai terminal penumpang tipe B, dapat dilakukan dengan perbaikan rute angkutan perkotaan trayek A.01 Cilegon-Anyer dan M.01 Cilegon-Merak yang diarahkan menuju Terminal Seruni, dan/atau penambahan trayek baru Cilegon-JLS. Dengan demikian, Terminal Seruni diharapkan dapat meningkatkan peran dalam melayani pergerakan masyarakat perkotaan di Kota Cilegon.

Kata Kunci : Terminal, Sistem Transportasi, Trayek, Angkutan Perkotaan

PENDAHULUAN

Kota Cilegon merupakan sebuah kota otonom di Provinsi Banten. Letak Kota Cilegon yang strategis dan didukung oleh sektor industri sebagai sektor unggulan, menjadikan Kota Cilegon sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai PKN Kota Cilegon menghasilkan tarikan pergerakan dari luar kota menuju Kota Cilegon, yang berakhir (turun) di dalam kota meskipun masih menggunakan angkutan perkotaan dari luar Kota Cilegon. Banyaknya angkutan perkotaan dari luar kota yang beroperasi di dalam Kota Cilegon turut menambah kemacetan pada Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, terutama pada jam-jam sibuk. Di samping menggunakan angkutan perkotaan dari tempat asal, penumpang dari luar Kota Cilegon juga banyak yang menggunakan sarana bus AKAP dan AKDP dan turun di terminal bayangan. Adanya kegiatan menaikkan/menurunkan penumpang di terminal bayangan tersebut menarik perhatian masyarakat untuk membuka lapak dagangannya. Fenomena yang demikian mengganggu kelancaran arus lalu-lintas kendaraan yang melalui jalan akses tol Cilegon Timur, dan untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Cilegon melaksanakan pembangunan Terminal Seruni.

Dengan adanya Terminal Seruni diharapkan bus-bus tidak lagi menurunkan penumpang di terminal bayangan, dan angkutan perkotaan dari luar Kota Cilegon tidak masuk ke dalam kota. Dari Terminal Seruni, penumpang dapat beralih moda dan melanjutkan perjalanan hingga ke tempat tujuan. Dengan demikian terminal Seruni memiliki arti penting dalam melayani pergerakan di wilayah Kota Cilegon.

PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivistik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan yaitu : (1) data volume lalu-lintas angkutan umum di Terminal Seruni, dan (2) data persepsi pengguna terminal Seruni. Data Sekunder yang dibutuhkan yaitu : (1) RTRW Kota Cilegon 2010-2030, (2) dokumen perencanaan Terminal Seruni, (3) jaringan jalan Kota Cilegon, (4) trayek angkutan perkotaan Kota Cilegon, dan (5) kebijakan pengembangan Terminal Seruni. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, kuesioner, dan wawancara. Untuk data volume lalu-lintas di Terminal Seruni dilakukan observasi di pintu masuk Terminal Seruni selama 15 jam, mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Untuk data persepsi pengguna terminal diambil sampel sebanyak 50 buah sampel, yang terdiri dari 5 sampel dari unsur pengelola Terminal Seruni, 10 sampel dari unsur operator angkutan umum, dan 35 sampel dari unsur calon penumpang. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive accidental sampling*. Hasil pengumpulan data persepsi pengguna terminal, sebelum dilakukan proses analisis, dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Setelah data tersebut dinyatakan reliabel dan valid maka dilanjutkan dengan analisis korelasi Spearman dan Kendall untuk mengetahui hubungan antar-variabel.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) analisis karakteristik pengguna terminal, (2) analisis volume lalu-lintas di Terminal Seruni, (3) analisis jaringan trayek angkutan perkotaan Kota Cilegon, dan (4) analisis kebijakan pengembangan Terminal Seruni. Untuk mempermudah analisis karakteristik pengguna terminal berdasarkan

hasil pengumpulan data persepsi pengguna terminal, maka digunakan alat bantu analisis berupa perangkat lunak SPSS 18. Untuk analisis jaringan trayek angkutan perkotaan, digunakan bantuan perangkat lunak ArcGIS 9.3 untuk menentukan rute terbaik angkutan perkotaan.

GAMBARAN UMUM

Terminal Seruni merupakan terminal penumpang yang relatif baru di Kota Cilegon. Terminal ini terletak di Jalan Sultan, berada dekat dengan jalan nasional Bojonegara dan pintu tol Cilegon Timur. Terminal yang mempunyai luas ± 2 ha ini secara resmi beroperasi mulai tanggal 1 April 2013.. Salah satu maksud pembangunan Terminal Seruni adalah untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Tirtayasa, dan sebagai upaya mengatasi fenomena terminal bayangan yang berada di jalan akses tol Cilegon Timur. Fasilitas utama yang dimiliki Terminal Seruni adalah : (1) jalur keberangkatan kendaraan umum, (2) jalur kedatangan kendaraan umum, (3) tempat parkir kendaraan umum, (4) ruang tunggu penumpang, (5) menara pengawas, (6) bangunan kantor terminal, (7) loket penjualan karcis, dan (8) tempat parkir kendaraan pengantar; sedangkan fasilitas penunjang berupa : (1) kamar kecil/toilet, (2) musholla, dan (3) kios/kantin.

Dalam RTRW Kota Cilegon 2010-2030 Terminal Seruni direncanakan sebagai terminal penumpang tipe B. Dalam RTRW tersebut Terminal Seruni berfungsi untuk melayani pergerakan orang dan kendaraan dalam skala regional/ Provinsi Banten. Penetapan rencana ini berdasarkan kondisi realistis Kota Cilegon yang sudah memiliki sebuah terminal penumpang antar kota antar provinsi, yaitu Terminal Terpadu Merak (TTM). Di lain pihak, Pemerintah Kota Cilegon mengeluarkan SK Walikota Nomor : 551.22/Kep.197-Dishub/2013 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C - Seruni. Hal ini disebabkan oleh keinginan Pemerintah Kota Cilegon untuk menyegerakan operasional Terminal Seruni, khususnya dalam mengantisipasi arus mudik Lebaran 2013. Keinginan untuk menyegerakan operasional Terminal Seruni ini terlihat dari belum selesainya beberapa fasilitas terminal seperti : kantor terminal, warung/kantin, musholla, dan penataan taman, pada saat peresmian operasional Terminal Seruni pada tanggal 1 April 2013. Dengan demikian, sampai dengan saat ini Terminal Seruni adalah terminal penumpang tipe C Kota Cilegon.

Berdasarkan pengamatan, Terminal Seruni relatif sepi pengunjung. Calon penumpang seharusnya turun/naik di Terminal Seruni, namun yang terjadi tidak demikian. Banyak pengumpang bus AKAP/AKDP yang memilih turun di luar terminal, yaitu di dekat persimpangan antara Jalan Bojonegara dengan jalan akses tol Cilegon Timur. Begitu juga calon penumpang yang akan naik kendaraan umum, menunggu bus AKAP/AKDP di tempat itu.

Di Terminal Seruni terdapat sarana angkutan perkotaan, yaitu angkutan perkotaan trayek P.01 Cilegon-PCI. Trayek tersebut saat ini merupakan satu-satunya yang ada di dalam Terminal Seruni. Trayek angkutan perkotaan Kota Cilegon diatur dalam Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 551.2/Kep.108-Dishub/2008 tanggal 27 Januari 2008. Berdasarkan SK tersebut trayek angkutan perkotaan Kota Cilegon terbagi ke dalam 8 (delapan) trayek, yaitu : (1) trayek M.01 Cilegon-Merak-Pulorida, (2) trayek A.01 Cilegon-Anyer, (3) trayek A.02 Cilegon-Mancak-Anyer, (4) trayek B.01 Cilegon-

Bojonegara, (5) trayek P.01 Cilegon-PCI, (6) trayek P.02 Cilegon-Waringin Kurung, (7) trayek P.03 Cilegon-Cibeber, dan (8) trayek P.04 Cilegon-TCI. Dalam operasionalnya, trayek angkutan perkotaan tersebut mengalami perubahan, sehingga saat ini trayek angkutan perkotaan Kota Cilegon terbagi menjadi 5 trayek, yaitu : (1) M.01 Cilegon-Merak, (2) A.01 Cilegon-Anyer, (3) A.02 Cilegon-Mancak, (4) B.01 Cilegon-Bojonegara, dan (5) P.01 Cilegon-PCI. Penetapan trayek ini sudah lebih dulu ada sebelum adanya Terminal Seruni, dan tidak dilakukan perubahan seperlunya ketika Terminal Seruni ada dan dioperasikan.

TABEL 1.
TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN DI KOTA CILEGON

No	Kode Trayek	Warna	Trayek	Jumlah Kendaraan	
				Alokasi	Realisasi
1	M.01	Merah	Cilegon – Merak	620	593
2	A.01	Silver	Cilegon – Anyer	400	381
3	A.02	Silver list kuning	Cilegon – Mancak	75	67
4	B.01	Biru	Cilegon – Bojonegara	120	66
5	P.01	Ungu	Cilegon –PCI	250	163
	Jumlah			1465	1270

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cilegon, 2013

Alokasi untuk kelima trayek tersebut adalah 1465 unit kendaraan, dan sudah terealisasi sebanyak 1270 unit kendaraan atau sebesar 86,69%. Jika dilihat berdasarkan peranannya dalam struktur jaringan jalan, trayek angkutan perkotaan di Kota Cilegon terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu : (1) *principal route*, (2) *secondary route*, dan (3) *branch route* (LPM-ITB,2007: IV-2) . Yang termasuk kelompok *principal route* adalah trayek M.01 Cilegon-Mancak, trayek A,01 Cilegon-Anyer, dan trayek P.01 Cilegon-PCI. Kelompok *secondary route* adalah trayek B.01 Cilegon-Bojonegara, sedangkan yang termasuk ke dalam *branch route* adalah trayek A.02 Cilegon-Mancak. Pengelompokan tersebut berdasarkan pada beban pelayanan dan daerah yang dilayani trayek.

Jaringan trayek angkutan perkotaan Kota Cilegon bila dicermati membentuk sebuah jaringan radial. Jaringan radial ini terbentuk karena jaringan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan kota dengan sub pusat kegiatan kota (Khisty dan Lall, 2006:136). Empat dari lima trayek angkutan perkotaan di Kota Cilegon menuju/melewati kawasan pusat perkotaan yang terletak di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam operasionalnya, trayek angkutan perkotaan Kota Cilegon termasuk dalam klasifikasi rute dengan batasan koridor. Rute dengan batasan koridor memperbolehkan angkutan perkotaan Kota Cilegon melakukan penyimpangan rute, namun mempunyai kewajiban utama melalui rute yang telah ditetapkan (LPM-ITB, 1997:IV-2). Penyimpangan ini terjadi karena rute angkutan perkotaan yang ada belum menjangkau seluruh kawasan permukiman

KAJIAN TEORI

Jaringan transportasi memiliki suatu pola tertentu. Menurut Adisasmita (2011:55) pola jaringan transportasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pola konvensional (*conventional tree pattern*), dan pola poligrad (*polygrid pattern*). Pada pola konvensional (*conventional tree pattern*), jaringan transportasi didapat disusun secara sederhana menghubungkan pusat kegiatan besar ke pusat kegiatan sedang, kemudian dari pusat kegiatan sedang ke pusat kegiatan kecil. Pada jaringan transportasi dengan pola *polygrid pattern*, jaringan jalan menghubungkan pusat kegiatan yang satu ke pusat-pusat kegiatan lainnya. Jaringan jalan *polygrid pattern* mempunyai ciri-ciri menyebar ke banyak pusat kegiatan.

Khisty dan Lall (2006:136) menyatakan bahwa jaringan rute angkutan umum di sebuah kota secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu : (1) jaringan kisi, (2) jaringan radial, dan (3) jaringan teritorial. Jaringan kisi mengikuti jaringan jalan yang sudah ada dan melalui pusat perdagangan utama (CBD). Sebagian besar rute merupakan rute langsung menuju CBD, dan sebagian lain memerlukan perpindahan rute. Jaringan radial umumnya terdapat pada kota-kota dengan rute dari pusat ke kota memencar ke pusat kegiatan lain. Hubungan antar pusat kegiatan lain di luar pusat kota dapat dihubungkan oleh jalan melingkar. Jaringan teritorial banyak digunakan pada kota-kota kecil dan sedang. Rute pada jaringan teritorial memberikan akses ke setiap bagian (teritorial) kota. Untuk kota besar, hal seperti ini berlaku pada daerah pinggiran kota.

Menurut LPM-ITB (1997:IV-2) rute angkutan umum diklasifikasikan menurut tipe pelayanan dan peran dalam struktur jaringan. Untuk klasifikasi menurut tipe pelayanan, rute angkutan umum dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu:

- (1) Rute tetap, yaitu bahwa angkutan umum harus melalui rute yang telah ditetapkan, dan tidak dibolehkan melakukan penyimpangan rute
- (2) Rute tetap dengan deviasi tertentu, yaitu angkutan umum dapat melakukan penyimpangan dengan alasan tertentu atau dalam keadaan darurat
- (3) Rute dengan batasan koridor, yaitu angkutan umum dapat melakukan penyimpangan rute, tetapi dibatasi oleh kewajiban melalui tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan
- (4) Rute dengan deviasi penuh, yaitu angkutan umum diberikan kebebasan penuh dalam menentukan rute perjalanan, sepanjang awal dan akhir rute adalah sama seperti yang telah ditentukan.

Untuk klasifikasi rute berdasarkan peran dalam struktur jalan, dapat dikelompokkan menjadi 7 yaitu :

- (1) *Trunk route*, yaitu rute dengan beban pelayanan paling tinggi, tingkat *demand* sangat tinggi. Rute ini melayani sepanjang hari dari pagi hingga malam, bahkan jika diperlukan pelayanan dapat 24 jam. Berada di koridor jalan utama atau berada di pusat kegiatan utama.
- (2) *Principal route*, yaitu rute dengan karakteristik hampir sama dengan *trunk route*, hanya tidak sampai larut malam. Biasanya dioperasikan hanya sampai jam 20.00 atau 22.00 malam.
- (3) *Secondary route*, yaitu rute dengan beban pelayanan lebih rendah daripada *trunk route* atau *principal route*. Biasanya melayani koridor dari daerah pemukiman ke sub pusat kota.

- (4) *Branch route*, yaitu rute yang berfungsi menghubungkan rute *trunk route* atau *principal route* dengan sub pusat kegiatan lainnya.
- (5) *Local route*, yaitu rute yang melayani suatu daerah yang relatif kecil, dan selanjutnya dihubungkan dengan rute lain yang lebih tinggi klasifikasinya
- (6) *Feeder route*, yaitu rute yang khusus disediakan untuk melayani *trunk route*, *principal route*, atau *secondary route*.
- (7) *Double feeder route*, yaitu rute *feeder* yang dapat melayani dua rute selakigus.

Rute yang baik harus memenuhi kriteria, salah satunya adalah mempunyai route *directness* yang sekecil mungkin. Route *directness* adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh rute terhadap jarak terdekat dari titik asal dan titik tujuan rute berupa garis lurus (LPM-ITB, 1997:IV-12). Rute angkutan perkotaan Kota Cilegon saat ini sebagian besar tidak melewati Terminal Seruni. Dalam penelitian ini rute terbaik dikaitkan dengan keberadaan Terminal Seruni.

Terminal merupakan alat untuk memproses kegiatan. Kegiatan terjadi karena ada elemen-elemen yang menciptakan terjadinya kegiatan, yaitu kendaraan, penumpang/barang, dan elemen lain. Kegiatan di dalam terminal menimbulkan pergerakan yaitu bangkitan pergerakan dari dalam terminal ke luar terminal. Di lain pihak terminal sebagai simpul transportasi menyebabkan terminal disinggahi oleh kendaraan atau orang dari luar terminal untuk menurunkan/menaikkan penumpang, dan pergantian antar/inter moda. Hal tersebut merupakan tarikan pergerakan. Dengan demikian terminal menghasilkan bangkitan dan tarikan pergerakan (Morlok, 1995:273).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan pada pasal 41, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 pasal 2, dan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005, bahwa terminal penumpang terbagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu :

- a. Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum AKAP, AKDP, lintas batas negara, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.
- b. Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum AKDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.
- c. Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum angkutan pedesaan.

ANALISIS

Analisis karakteristik Terminal Seruni mempunyai tiga variabel penelitian, yaitu fasilitas terminal, aksesibilitas, dan trayek angkutan perkotaan. Untuk fasilitas terminal diperoleh hasil bahwa fasilitas Terminal Seruni saat ini dapat menunjang aktivitas pengguna selama di terminal. Untuk aksesibilitas diperoleh hasil bahwa Terminal Seruni belum dapat memenuhi harapan pengguna terminal dalam mengakses terminal, hal ini terkait dengan ketersediaan trayek angkutan perkotaan yang ada di Terminal Seruni. Trayek angkutan yang masuk ke dalam Terminal Seruni hanya ada satu yaitu trayek P.01 Cilegon-PCI. Namun demikian, keterbatasan trayek angkutan perkotaan di dalam Terminal Seruni bukanlah penyebab banyaknya penumpang yang turun di luar Terminal Seruni. Menurut pengguna terminal, penambahan trayek

angkutan perkotaan di dalam Terminal Seruni akan meningkatkan jumlah pengguna Terminal Seruni.

Analisi volume lalu-lintas di Terminal Seruni menunjukkan bahwa Terminal Seruni lebih banyak melayani angkutan bus AKAP dengan prosentase sebesar 74,32%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan AKAP (3,80%) dan angkutan perkotaan (21,88%). Tingginya prosentase bus AKAP ini disebabkan oleh besarnya permintaan (*demand*) pengguna angkutan naik/turun di dekat pusat Kota Cilegon, namun yang disayangkan adalah penumpang tidak turun di terminal. Penumpang lebih memilih turun di dekat persimpangan antara jalan Bojonegara dan jalan akses tol Cilegon Timur. Dengan turunnya penumpang di luar terminal, maka bus yang masuk Terminal Seruni dalam keadaan kosong. Bus yang masuk terminal pada umumnya hanya melintas, dan langsung keluar untuk melanjutkan perjalanan.

Sepanjang pengamatan tidak ditemukan angkutan perkotaan warna biru muda (*light blue*) yang masuk ke dalam Terminal Seruni. Angkutan warna biru muda ini merupakan angkutan perkotaan asal Kabupaten/Kota Serang. Sejatinya keberadaan Terminal Seruni ini adalah sebagai titik simpul bagi angkutan perkotaan yang berasal dari luar Kota Cilegon. Angkutan perkotaan dari luar Kota Cilegon seharusnya hanya sampai di Terminal Seruni, sehingga tidak beroperasi di wilayah perkotaan. Ketiadaan angkutan umum warna biru muda ini mengindikasikan Terminal Seruni belum berperan sebagai simpul transportasi, tempat perpindahan moda angkutan umum dari luar Kota Cilegon ke angkutan perkotaan Kota Cilegon.

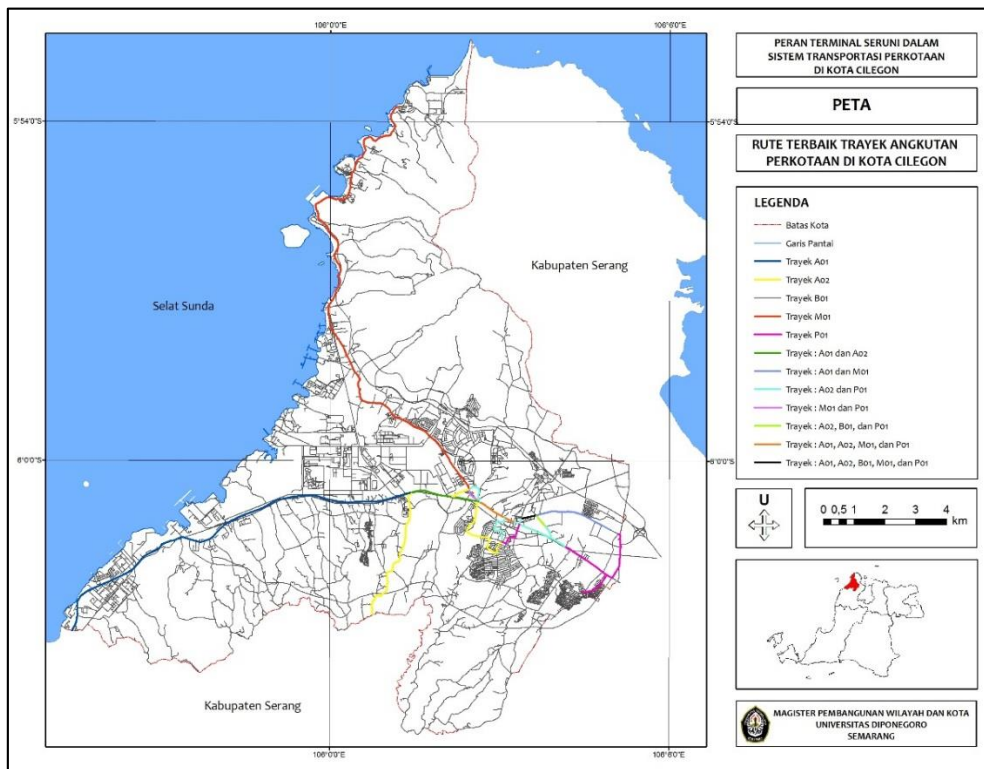
Dari lima trayek angkutan perkotaan Kota Cilegon, empat diantaranya mempunyai satu persamaan yaitu melewati kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota yang berada di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Keempat trayek yang melewati kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota adalah : (1) trayek M.01 Cilegon-Merak, (2) trayek A.01 Cilegon-Anyer, (3) trayek A.02 Cilegon-Mancak, dan (4) trayek P.01 Cilegon-PCI.

Banyaknya trayek angkutan perkotaan yang melewati pusat kota disebabkan oleh permintaan (*demand*) pengguna angkutan. Di kawasan pusat kota ini kebutuhan masyarakat Kota Cilegon dapat dengan mudah diperoleh. Adanya permintaan yang tinggi dari pengguna menyebabkan penawaran (*supply*) yang tinggi pula. Meskipun demikian, jumlah angkutan perkotaan yang terlalu banyak pada ruas jalan tertentu akan menimbulkan masalah lalu-lintas. Beban lalu-lintas di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa akan semakin bertambah berat. Kepadatan dan tundaan lalu-lintas akan meningkat seiring dengan bertambahnya kendaraan.

Dilihat dari pola jaringan transportasi, Kota Cilegon memiliki bentuk pola jaringan menyerupai *Conventional Tree Pattern*. Sesuai dengan pola ini, pusat kota sebagai pusat kegiatan utama dihubungkan dengan sub pusat kota sebagai pusat kegiatan yang lebih kecil. Pusat kota dan sub pusat kota dihubungkan dan didukung oleh prasarana dan sarana transportasi. Angkutan perkotaan Kota Cilegon memiliki rute yang hampir seluruhnya menuju ke pusat kota. Dari lima trayek angkutan perkotaan yang beroperasi, empat diantaranya menuju pusat kota. Jaringan trayek seperti ini termasuk ke dalam kelompok jaringan radial (Khisty & Lall, 2006:136).

Berdasarkan perannya pada struktur jaringan jalan, maka trayek angkutan perkotaan yang ada di Kota Cilegon dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Trayek M.01 Cilegon-Mancak, trayek A.01 Cilegon-Anyer, dan trayek P.01 Cilegon-PCI, beroperasi pada pada koridor utama yaitu Jalan Sultan Ageng Tirtayasa dan Jalan Ahmad Yani, mempunyai beban pelayanan dan permintaan (*demand*) yang tinggi. Beroperasi tidak sampai 24 jam, atau rata-rata hanya sampai jam 23.00. Ketiga trayek ini digolongkan sebagai *principal route*.
- Trayek B.01 Cilegon-Bojonegara, beroperasi tidak pada koridor utama, dan memiliki beban pelayanan lebih rendah daripada trayek M.01 Cilegon-Merak, trayek A.01 Cilegon-Anyer, dan trayek P.01 Cilegon-PCI. Trayek seperti ini digolongkan sebagai *secondary route*.
- Trayek A.02 Cilegon-Mancak, beroperasi pada daerah/kawasan yang mempunyai permintaan relatif lebih rendah, dan berfungsi sebagai penghubung daerah/kawasan sekitar Mancak dengan pusat kota. Jumlah armadanya pun jauh lebih sedikit dibandingkan trayek lainnya, disesuaikan dengan permintaan. Trayek seperti ini digolongkan sebagai *branch route*



Sumber : Hasil analisis, 2014

GAMBAR 1.
RUTE TERBAIK ANGKUTAN PERKOTAAN KOTA CILEGON

Dari lima trayek yang ada, terdapat tiga trayek yang mempunyai peran strategis dan mempunyai beban pelayanan yang tinggi, yaitu trayek A.01 Cilegon-Anyer, trayek M.01 Cilegon-Merak, dan trayek P.01 Cilegon-PCI. Untuk trayek P.01 Cilegon-PCI sudah terhubung dengan Terminal Seruni, sedangkan trayek A.01 Cilegon-Anyer dan M.01 Cilegon-Merak saat ini belum terhubung ke Terminal Seruni. Untuk itu rute A.01 Cilegon-Anyer dan M.01 Cilegon-Merak perlu dianalisis dan dihubungkan dengan

Terminal Seruni. Analisis yang akan dilakukan adalah analisis rute terbaik menggunakan ArcGIS 9.3 seperti pada Gambar 1 di atas.

Dengan bantuan perangkat lunak ArcGIS 9.3 diperoleh rute terbaik angkutan perkotaan sebagai berikut :

- (1) Trayek A.01 Cilegon-Anyer melalui rute : Anyer-Simpang Tiga- Jl.Sultan Ageng Tirtayasa-Jl. Kartini-Jl.KH. Aliyudin-Jl. Kranggan-Jl. Sultan-Terminal Seruni (PP)
- (2) Trayek M.01 Cilegon-Merak melalui rute : Suralaya-Merak-Jl. Raya Merak-Jl. Jend. Sudirman-Jl.Sultan Ageng Tirtayasa-Jl. Kartini-Jl.KH. Aliyudin-Jl. Kranggan-Jl. Sultan-Terminal Seruni (PP).

Salah satu indikator rute yang baik menurut LPM-ITB (1997:IV-12) adalah *route directness*. *Route directness* diperoleh dari perbandingan antara panjang rute dengan jarak terdekat rute. Panjang rute diukur dari panjang jalan yang dilalui rute dari awal trayek sampai akhir trayek. Untuk jarak terdekat diukur berdasarkan garis lurus antara awal trayek dan akhir trayek. Ketentuan rute yang baik adalah yang mempunyai *route directness* sekecil mungkin. Trayek A.01 Cilegon-Anyer mempunyai panjang rute 26,59 km dan jarak terdekat 16,24 km. Dengan demikian *route directness* trayek A.01 Cilegon-Anyer adalah sebesar 1,64. Untuk trayek M.01 Cilegon-Merak mempunyai panjang rute 20,11 km dan jarak terdekat 12,88 km. Jadi, *route directness* trayek M.01 Cilegon-Merak adalah sebesar 1,56. Angka *route directness* 1,64, dan 1,56 tersebut adalah angka untuk trayek *existing*. Angka ini perlu dibandingkan dengan angka *route directness* untuk rute hasil analisis ArcGIS 9.3.

TABEL 2.
ROUTE DIRECTNESS A.01 CILEGON-ANYER DAN M.01 CILEGON-MERAK

No.	Trayek	Panjang Rute (km)	Jarak Terdekat (km)	Route Directness	Keterangan	
1	A.01 Cilegon-Anyer	<i>existing</i>	26,59	16,24	1,64	kurang baik
		<i>best</i>	20,11	17,78	1,13	lebih baik
2	M.01 Cilegon-Merak	<i>existing</i>	20,11	12,88	1,56	kurang baik
		<i>best</i>	22,40	15,44	1,45	lebih baik

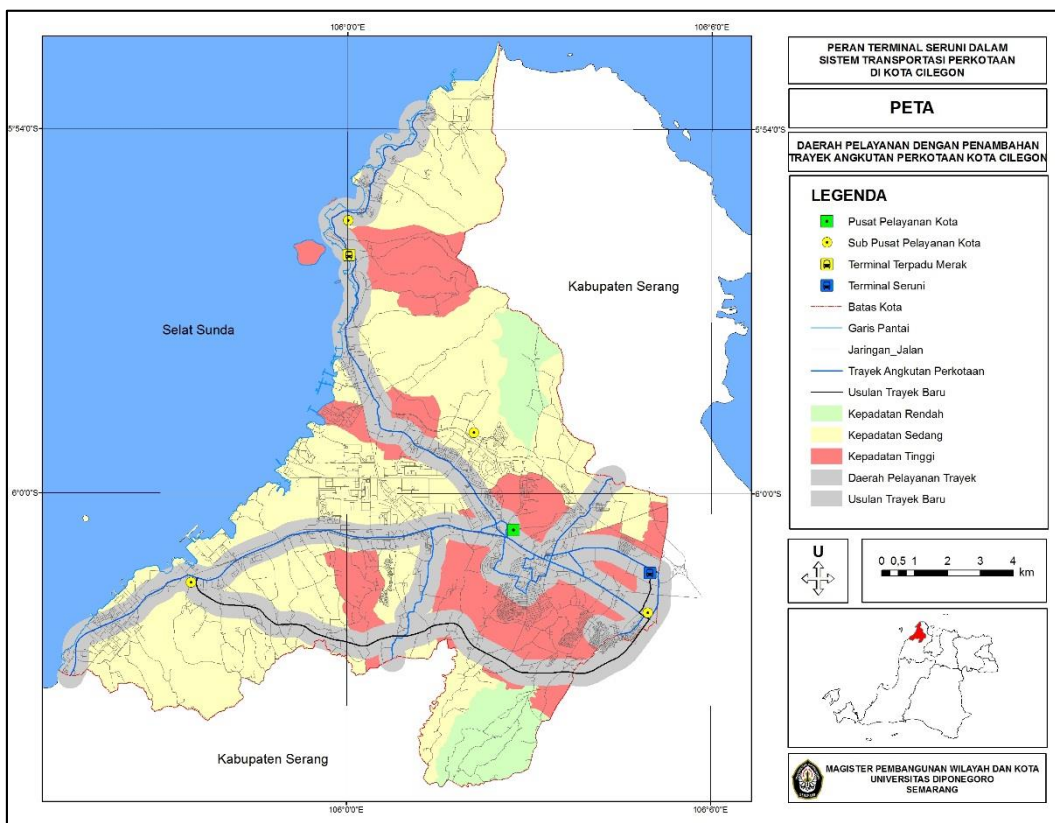
Sumber : Hasil analisis, 2014

Trayek M.01 rute terbaik menghasilkan panjang rute 22,40 km. Panjang rute ini lebih besar dibandingkan rute *existing* untuk trayek M.01 Cilegon-Merak yaitu 20,11 km. Hal ini bukan karena berkelok-kelok, melainkan adanya penambahan rute yang semula tujuan akhir Merak menjadi Suralaya yang terletak lebih jauh dari pusat kota, dan juga sampai masuk Terminal Seruni. Dengan demikian, jarak terdekat berubah dari 12,88 km (*existing*) menjadi 15,44 km (rute terbaik). Angka *route directness* diperoleh sebesar 1,45 atau lebih kecil daripada *route directness existing* sebesar 1,56.

Jalan Lingkar Selatan (JLS) saat ini belum dapat digunakan secara optimal mengingat kondisi jalan yang rusak dan masih dalam proses perbaikan. JLS menghubungkan kawasan Cilegon Timur dengan kawasan industri Ciwandan dan kawasan wisata Anyer. Dengan melewati JLS, maka pengemudi tidak akan melalui jalan koridor utama Jalan

Ahmad Yani dan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam RTRW Kota Cilegon 2010-2030, di beberapa titik sekitar jalan yang dilalui JLS akan dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang baru. Dengan adanya pusat perdagangan dan jasa yang baru ini diharapkan beban lalu-lintas di koridor utama menjadi berkurang. Di samping itu pengembangan kota menjadi lebih luas, tidak terpusat di koridor utama Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Kawasan perdagangan dan jasa yang baru ini perlu mendapat dukungan pelayanan sarana angkutan perkotaan. Untuk itu perlu diadakan penambahan rute angkutan perkotaan yang baru yaitu Cilegon-JLS, dengan rute melalui : Terminal Seruni-Jl. Cik Di Tiro-Jl. Ahmad Yani-JLS-Ciwandan.

Untuk menentukan daerah pelayanan sebuah trayek dapat dilakukan dengan bantuan ArcGIS 9.3 yaitu menggunakan fasilitas *buffer*. Masing-masing trayek dibuatkan *buffer*-nya sehingga diperoleh gambaran daerah pelayanan trayek angkutan perkotaan Kota Cilegon. Pada Gambar 2 di bawah dapat dilihat trayek angkutan perkotaan melalui daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan sedang. Dapat dilihat pula bahwa kepadatan penduduk Kota Cilegon berada di sekitar pusat kota. Oleh karena itu, rute angkutan perkotaan Kota Cilegon berorientasi menuju ke pusat kota. Orientasi ke pusat kota ini menyebabkan bentuk rute angkutan perkotaan Kota Cilegon berbentuk radial. Pada rute berbentuk radial, jaringan rute memancar dari pusat ke kota ke pusat kegiatan lain. Sub-sub pusat kota dilalui rute angkutan perkotaan.



Sumber : Hasil analisis, 2014

GAMBAR 2.
DAERAH PELAYANAN DENGAN PENAMBAHAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN KOTA CILEGON

Perbaikan rute angkutan perkotaan pada A.01 Cilegon-Anyer dan M.01 Cilegon-Merak tidak merubah peran trayek tersebut dalam struktur jaringan, yaitu tetap sebagai *principal route*. Untuk usulan rute baru yaitu Cilegon-JLS berdasarkan peran dalam struktur jaringan, maka termasuk ke dalam kelompok *secondary route* karena beban pelayanan tidak melebihi *principal route* dan juga berfungsi menghubungkan sub pusat pelayanan kota di sekitar Ciwandan dan sub pelayanan kota di sekitar PCI. Untuk trayek P.01 Cilegon-PCI dan A.02 Cilegon-Anyer, tidak mengalami perubahan yaitu masing-masing sebagai *principal route* dan *branch route*.

Keberadaan Terminal Seruni semestinya didukung oleh kebijakan trayek angkutan perkotaan yang terhubung dengan Terminal Seruni. Trayek angkutan perkotaan yang sekarang berlaku merupakan kebijakan Pemerintah Kota Cilegon melalui SK Walikota Nomor : 551.2/Kep.108-Dishub/2008. Saat ini trayek angkutan perkotaan Kota Cilegon yang melalui Terminal Seruni hanya ada satu yaitu trayek P.01 Cilegon-PCI. Untuk meningkatkan peran Terminal Seruni dalam sistem transportasi perkotaan, maka perlu adanya penambahan trayek angkutan perkotaan yang terhubung dengan Terminal Seruni. Berdasarkan hasil analisis jaringan menggunakan ArcGIS 9.3, diperoleh rute terbaik A.01 Cilegon-Anyer dan M.01 Cilegon-Merak yang terhubung dengan Terminal Seruni. Untuk itu, perlu adanya SK Walikota yang baru yang mengatur trayek angkutan perkotaan.

KESIMPULAN

Terminal Seruni kurang memiliki peran sebagai simpul transportasi, yaitu tempat menaikkan / menurunkan penumpang, dan perpindahan intra/antar moda angkutan. Kurangnya peran Terminal Seruni dalam sistem transportasi perkotaan di Kota Cilegon, menyebabkan masih tingginya tingkat kemacetan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, terutama pada jam-jam sibuk. Angkutan perkotaan dari Kabupaten/Kota Serang masih bebas beroperasi di wilayah Kota Cilegon. Untuk meningkatkan peran tersebut dibutuhkan penambahan trayek angkutan perkotaan yang terhubung dengan Terminal Seruni, yaitu trayek A.01 Cilegon-Anyer dan M.01 Cilegon-Merak. Selain itu, dapat diusulkan penambahan trayek Cilegon-JLS yang terhubung ke Terminal Seruni. Dengan demikian di Terminal Seruni terdapat 4 trayek angkutan perkotaan, yaitu A.01 Cilegon-Anyer, M.01 Cilegon- Merak, P.01 Cilegon-PCI, dan Cilegon-JLS

Terminal Seruni harus melakukan pembenahan internal, yaitu dengan menambah jumlah trayek angkutan perkotaan di Terminal Seruni, dan mengembalikan fungsi ruang tunggu penumpang. Penambahan trayek angkutan perkotaan yang terhubung dengan Terminal Seruni adalah A.01 Cilegon-Anyer dan M.01 Cilegon-Merak. Pembenahan eksternal yang dapat dilakukan adalah peningkatan infrastruktur Jalan Bojonegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Jaringan Transportas : Teori dan Analisis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Khisty, C. Jotin dan B. Kent Lall. 2006. *Dasar-dasar Reyasa Transportasi Jilid 2*. Edisi 3. Alih Bahasa Julian Gressando. Editor Wibi Hardani. Jakarta : Erlangga.
- Modul Pelatihan : Perencanaan Sistem Angkutan Umum*. 1997. Lembaga Pengabdian Masyarakat ITB bekerjasama dengan Kelompok Bidang Keahlian Rekayasa Transportasi Jurusan Teknik Sipil ITB.
- Morlok, Edward K. 1995. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Terjemahan Johan K. Hainim. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan.

Peran Kelembagaan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Trenggalek

Gandhi Rahma Puspasari¹, Mussadun²

Diterima : 26 Januari 2016

Disetujui : 8 Desember 2016

ABSTRACT

One of the social problems that often arise in urban areas is a waste problem. Waste problem is basically caused by many things, such as the lack of good waste management, the behavior of a society that is still low in maintaining hygiene and environmental health, as well as the growing population, thus adding of waste produced by households. Waste management in the region, will involve communities, government, NGOs and the private sector. But in Trenggalek, the absence of private parties who participated in addressing rural waste. Waste management in Trenggalek handled by the government and the people who lead the waste pelayananaan less than optimal or not in accordance with existing regulations. The aim of this study was to assess the extent to which institutional role in waste management in Trenggalek, in creating a healthy environment, berhindar of soil and water pollution caused by garbage. The analysis in this study was performed using Pearson correlation analysis, crosstab analysis and scale analysis. Results from this study were 1) Waste in Trenggalek differentiate into 2 (two), namely organic and inorganic waste, the most dominant is the leaf litter and food waste amounted to 81.30%. 2) Institute for waste management there are only two (2) institutions, namely the government and society. 3) Waste management in Trenggalek done by way of being transported by a janitor, burned and dumped into the river. 4) The role of each institution shows that government plays an important role in waste management in Trenggalek. 5) Based on the analysis of the correlation between institutional waste management indicates that the government has a weak relationship with the community, so that waste management is less than optimal.

Keywords : Waste Management , Institutional Roles

ABSTRAK

Salah satu permasalahan sosial yang sering timbul di perkotaan adalah permasalahan sampah. Permasalahan sampah pada dasarnya disebabkan oleh banyak hal, seperti kurangnya pengelolaan sampah secara baik, perilaku masyarakat yang masih rendah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta semakin besarnya populasi, sehingga menambah timbulan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Pengelolaan Persampahan di suatu wilayah, akan melibatkan masyarakat, pemerintah, LSM dan swasta. Tetapi di Kabupaten Trenggalek, belum adanya pihak swasta yang turut dalam menangani persampahan perdesaan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek di tangani oleh pemerintah dan masyarakat saja yang mengakibatkan pelayanan persampahan kurang optimal atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji sejauh mana peran kelembagaan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek, dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, berhindar dari polusi tanah dan air yang disebabkan karena sampah. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis korelasi pearson, analisis crosstab dan analisis skala. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Sampah yang ada di Kabupaten Trenggalek di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan anorganik, yang paling dominan adalah sampah daun dan sisa makanan sebesar 81.30%. 2) Lembaga dalam pengelolaan sampah hanya ada 2 (dua) lembaga yaitu pemerintah dan masyarakat. 3) Pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek dilakukan dengan cara diangkut oleh petugas kebersihan, di bakar serta di buang ke sungai. 4) Sedangkan peran masing-masing lembaga menunjukkan bahwa pemerintah sangat berperan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek. 5) Berdasarkan analisis korelasi antar kelembagaan pengelolaan persampahan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki hubungan yang lemah dengan masyarakat, sehingga pengelolaan sampah kurang optimal.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Peran Kelembagaan

¹Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kontak Penulis : gandhirahma@gmail.com

² Dosen Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan sosial yang sering timbul di perkotaan adalah permasalahan sampah (Ikhsandri et al, 2014:137). Permasalahan ini tumbuh seiring dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, yang menjadikan semakin banyak barang yang dikonsumsi dan juga sampah yang ditimbulkannya. Peningkatan jumlah sampah juga berasal dari semakin banyaknya usaha dalam bidang kuliner, yang menghasilkan sampah setiap harinya. Sampah juga bisa berasal dari kemajuan teknologi, sehingga masyarakat cenderung lebih konsumtif dan mengikuti perkembangan teknologi, untuk menggantikan teknologi yang lama.

Pengelolaan persampahan tidak dapat dipisahkan dengan peran kelembagaan. Pengelolaan sampah pada dasarnya melibatkan *stakeholders*. Dalam pengelolaan sampah yang berbasis 3R (*Reduce*/mengurangi sampah untuk mencegah penimbunan, *Reuse*/penggunaan kembali barang yang telah dipakai dan *Recycle*/mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis), *stakeholders* terdiri dari masyarakat penghasil sampah, LSM, pihak swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masing-masing *stakeholder* tersebut memiliki peran dalam pengelolaan persampahan (Damhuri dan Padmi, 2010:25).

Dalam skala Kabupaten Trenggalek sampah ditangani oleh Sub Dinas Perumahan, Permukiman dan Kebersihan. Beberapa permasalahan persampahan yang ditemui di Kabupaten Trenggalek adalah pelayanan sampah masih terbatas di wilayah perkotaan, permukiman padat, pertokoan, perkantoran, dan pasar. Masih banyak titik pelayanan yang belum menyentuh wilayah-wilayah yang ada di kecamatan, minimnya sarana dan prasarana sehingga tidak optimal dalam pelayanan dan kinerja. Tempat Pembuangan Akhir masih menggunakan model *Open Dumping* & proses menuju *Control Landfield*. Minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk database persampahan. Database ini tentunya sangat berguna bagi pemerintah dalam upaya melakukan *forecasting* terhadap permasalahan sampah (Pokja Sanitasi Kabupaten Trenggalek, 2014). Dari beberapa permasalahan persampahan yang ada di Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus berkembang, sementara upaya yang dilakukan pemerintah dengan hanya mengambil sampah dari sumber sampah untuk ditampung di Tempat Penampungan Akhir (TPA), hanya akan mengurangi daya tampung TPA. Minimnya fasilitas pengangkutan yang dimiliki pemerintah untuk memindahkan persampahan dari rumah tangga ke TPS maupun TPA, menjadikan sampah rumah tangga sering menumpuk di depan rumah, sehingga merusak keindahan kota, bahkan dapat menimbulkan sumber penyakit dan polusi udara (karena bau sampah). Oleh karenanya pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup di wilayahnya, harus mampu untuk mengembangkan beberapa upaya dalam pengelolaan sampah.

Terkait dengan peran kelembagaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek, masih ditemui beberapa permasalahan seperti belum adanya peran LSM dan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek (Temuan Lapangan, 2014). Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif untuk mencari sistem pengelolaan sampah, baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Tidak hanya berfokus pada sistem *end of pipe*, tetapi harus berupaya untuk mengatasi permasalahan sampah sejak awal, seperti *clean production* ataupun pemanfaatan sampah menjadi barang yang berdaya guna, serta adanya peran kelembagaan dalam mendukung pengelolaan sampah. Atas dasar tersebut, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran kelembagaan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma *positivism logic*. *Positivisme logic* menurut Lingkaran Wina (1929) dalam Rizky (2013) berupaya membatasi pemikiran pada hal-hal yang dapat di buktikan dengan pengamatan atau analisis definisi dan relasi antar istilah-istilah, sedangkan metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, kuisioner, wawancara, dan kajian literature. Wawancara dijadikan pendukung saja, bukan merupakan alat utama dalam pengumpulan data. Untuk jumlah ukuran sampel yang di butuhkan di hitung menggunakan rumus *Slovin* (Tim diktat Upi, 2013) yang menghasilkan 100 jumlah responden yang dilakukan dengan teknik menggunakan *Stratified Purposive Sampling*.

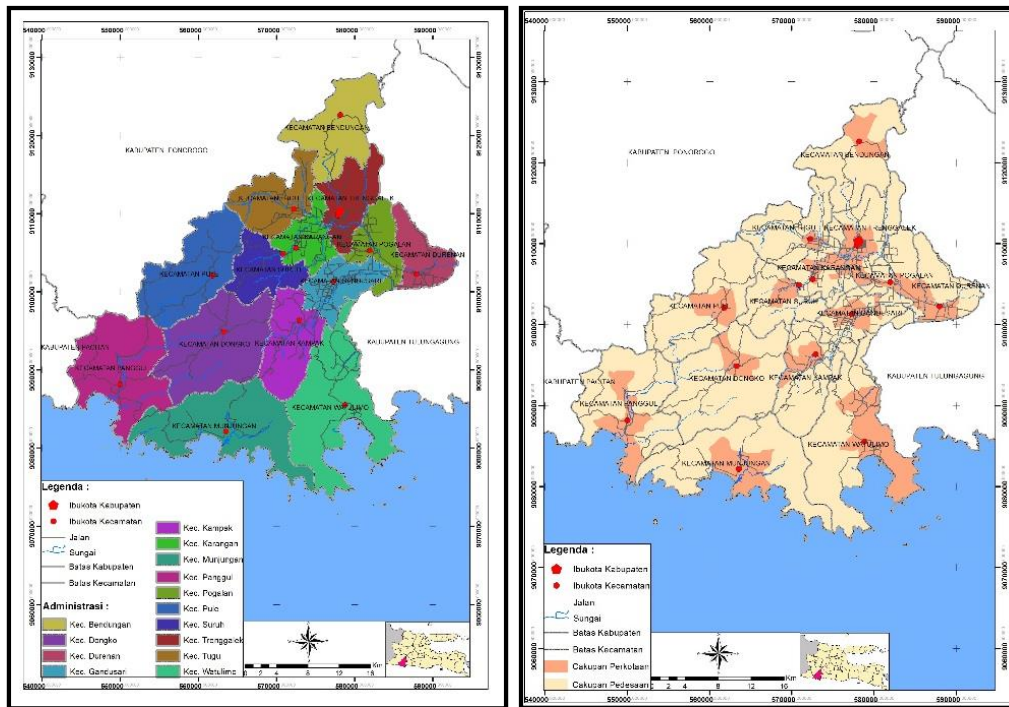
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis korerasi *pearson*, dimana analisis ini gunakan untuk mengetahui hubungan dari masing-masing kelembagaan dalam pengelolaan sampah. Sedangkan analisis *crosstab* digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek. Selain analisis tersebut, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis skala, dimana analisis ini di gunakan untuk mengukur peran masing-masing kelembagaan dalam penegelolaan sampah yang ada di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan kajian literatur terkait penelitian maka diperoleh beberapa variabel yang akan dianalisis terkait peran kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek. Adapaun variabel tersebut adalah sampah organik, sampah anorganik, peran pemerintah, peran masyarakat, peran swasta dan peran LSM.

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Kabupaten Trenggalek secara geografis terletak pada koordinat 111°24'-121°11' Bujur Timur dan 7°53'-8°34' Lintang Selatan. Luas Kabupaten Trenggalek adalah 1.261,40 km² atau 126,140 Ha. Wilayah administratif Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 Kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 836.778 jiwa.

Kondisi persampahan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2013 mempunyai total timbulan sampah di Kabupaten Trenggalek sebesar 686,60 m³ sampah per hari dengan jumlah 64,91 m³ sampah per hari berada di wilayah perkotaan. Dan timbulan sampah pertahunnya saat ini mencapai 54.408 m³/tahun. Pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek yang sudah terlayani penanganannya oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek dengan cara di angkut ke TPS dan selanjutnya ke TPA.

Dari total timbulan sampah 686,60 m³ per hari, baru sekitar 8,59% yang di angkut perharinya, sisanya di kelola sendiri oleh masyarakat dengan cara di buang kesungai, dibakar maupun di timbun. Sarana prasana yang dimiliki oleh sangat terbatas, menjadikan pengelolan kurang optimal. Sedangkan dari aspek kelembagaan, pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalake di tangani oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diwakili oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek.



Sumber: Buku Putih Kabupaten Trenggalek

GAMBAR 1.
PETA ADMINISTRASI DAN PETA CAKUPAN WILAYAH PERSAMPAHAN
KABUPATEN TRENGGALEK

HASIL DAN PEMBAHASAN

JENIS SAMPAH DAN VOLUME SAMPAH

Data mengenai komposisi sampah rumah tangga sangat dibutuhkan untuk perencanaan pengelolaan persampahan dengan baik. Dengan data tersebut, pihak pengelola akan dapat memahami komposisi sampah, sehingga akan dapat dilakukan penanganan sampah yang baik dan tepat. Berdasarkan hasil penelitian maka, jenis dan volume sampah yang ada di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.
JENIS DAN VOLUME SAMPAH DI KABUPATEN TRENGGALEK

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)	Sampah anorganik							Sampah organik
			Plastik (9,93%)	Kertas (4,75%)	Kain (0,86%)	Kayu (1,61%)	Karet/Kulit (0,45%)	Kaca (0,50%)	Logam (0,60%)	Daun dan sisa makanan (81,30%)
Pangul	90.911	69,02	6,85	3,28	0,59	1,11	0,311	0,35	0,41	56,11
Munjungan	57.784	45,34	4,50	2,15	0,39	0,73	0,204	0,23	0,27	36,86
Watulino	79.013	65,12	6,47	3,09	0,56	1,05	0,293	0,33	0,39	52,94
Kampak	41.143	34,27	3,40	1,63	0,29	0,55	0,154	0,17	0,21	27,86
Dongko	74.777	60,75	6,03	2,89	0,52	0,98	0,273	0,30	0,36	49,39

Pule	62.393	51,92	5,16	2,47	0,45	0,84	0,234	0,26	0,31	42,21
Karangan	56.435	47,57	4,72	2,26	0,41	0,77	0,214	0,24	0,29	38,67
Suruh	29.467	25,71	2,55	1,22	0,22	0,41	0,116	0,13	0,15	20,90
Gandusari	58.484	50,93	5,06	2,42	0,44	0,82	0,229	0,25	0,31	41,41
Durenan	61.391	48,55	4,82	2,31	0,42	0,78	0,218	0,24	0,29	39,47
Pogalan	61.050	49,83	4,95	2,37	0,43	0,80	0,224	0,25	0,30	40,51
Trenggalek	75.907	62,83	6,24	2,98	0,54	1,01	0,283	0,31	0,38	51,08
Tugung	57.578	48,21	4,79	2,29	0,41	0,78	0,217	0,24	0,29	39,19
Bendungan	30.445	25,55	2,54	1,21	0,22	0,41	0,115	0,13	0,15	20,77
		685,60	68,08	32,57	5,90	11,04	3,09	3,43	4,11	557,39

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Dari tabel diatas dapat di identifikasikan bahwa komposisi sampah berdasarkan timbulan sampah yang komposisi sampah yang yang paling dominan adalah sampah daun dan sisa makanan yaitu sebesar 557,39 m³ per hari. Daerah penghasil sampah daun dan sisa makanan paling banyak berasal dari Kecamatan Panggul yaitu sebesar 56,11 m³ per hari, dan paling rendah daerah penghasil sampah daun dan sisa makanan berasal dari Kecamatan Bendungan yaitu sebesar 20, 77 m³ per hari. Sedangkan paling rendah komposisi sampah yaitu jenis sampah karet yaitu sebesar 3,09 m³ per hari.

KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TRENGGALEK

Kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

Penanganan sampah di Kabupaten Trenggalek didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, pelaksana penanganan sampah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan. Secara khusus Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan bidang kebersihan. Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan mulai dari membuat kebijakan teknis di bidang kebersihan, membuat program kegiatan, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan kebersihan, pembinaan dan pengendalian, serta pelaporan kinerja kebersihan.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan komponen dalam suatu komunitas yang menempati posisi penting dalam berbagai aspek pembangunan. Masyarakat selalu menjadi aspek utama karena pembangunan ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi penting karena beberapa faktor. Pertama, masyarakat sebagai penghasil sampah yang cukup besar karena sebagai akibat dari pola konsumsi yang terus menerus. Kedua, masyarakat seharusnya bisa mandiri dalam pengelolaan persampahan guna mendukung tercipta pengelolaan persampahan yang berkelanjutan, sehingga tidak selamanya menjadi beban pemerintah. Dan yang ketiga, karena semakin terbatasnya lahan agar tercapainya zero waste dapat diterapkan

masyarakat guna menjawab permasalahan ketersediaan lahan untuk TPA. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek hanya sebatas pada penyediaan tong sampah saja. Adapun peran dalam pemilahan sampah dilakukan secara tidak langsung karena sebagai akibat dari sampah yang tidak diangkut oleh pemerintah.

3. Swasta

Berdasarkan informasi yang ada diketahui bahwa minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi masih rendah. Alasan yang umum dikemukakan adalah pertimbangan ekonomis dan keuangan, peraturan dan perundangan yang belum mendukung dan sebagainya. Kondisi ini menjadikan pemerintah tidak dapat mengandalkan bantuan dari pihak swasta untuk membantu dalam pengelolaan persampahan.

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TRENGGALEK

Pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek dilakukan dengan berbagai cara yaitu diangkut oleh petugas kebersihan, atau ditimbun, dibakar, di buang secara *open dumping* atau sungai oleh masyarakat. Dalam mempermudah pengangkutan Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyediakan tong sampah sebagai tempat hasil sampah rumah tangga, dalam hal ini masyarakat juga ikut berperan dalam menyediakan tong sampah.

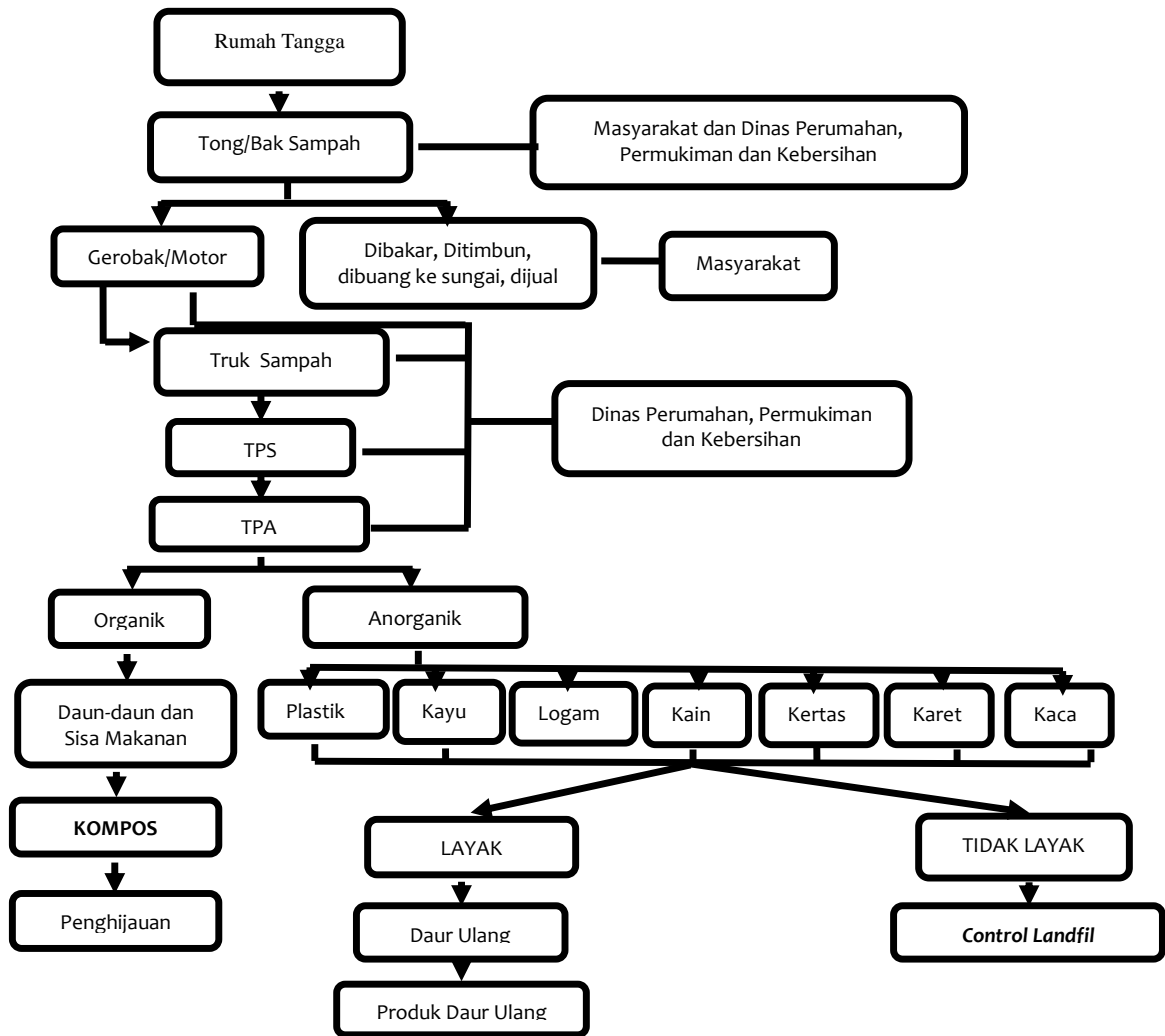
Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara diangkut dari tong sampah menggunakan gerobak sampah atau motor sampah, bahkan dengan menggunakan truk sampah. Sarana prasarana tersebut disediakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek. Sampah yang bias diangkut selanjutnya di bawa menuju TPS, yang kemudian dilanjutkan menuju TPA. Sedangkan sampah yang tidak terangkut ditangani oleh masyarakat sendiri, pengelolaan sampah yang tidak terangkut dilakukan dengan cara di ditimbun, bahkan ada sebagian masyarakat yang masih membuang sampah di sungai.

Selain dengan cara tersebut, pengelolaan sampah yang tidak terangkut ada sebagian masyarakat yang secara tidak langsung memilah sampah tersebut yang kemudian sampah yang bersifat anorganik di jual ke tukang rosok. Hal ini terjadi karena masih terbatasnya tenaga kebersihan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek, sehingga tidak dapat melayani keseluruhan wilayah Kabupaten Trenggalek.

Pada dasarnya kawasan perkotaan sudah dilakukan pemilahan sampah yaitu dengan menyediakan tempat sampah baik untuk sampah basah maupun sampah kering, akan tetapi pada waktu pengangkutan sampah tidak di bedakan berdasarkan dengan sifat maupun jenis sampah, sehingga dalam tahap pengangkutan ini sampah tercampur kembali. Sistem pengangkutan sampah untuk kawasan perkotaan menggunakan truk sampah dan gerobak sampah yang disediakan oleh pemerintah.

Saat ini sudah tersedia TPA dengan sistem *control landfill*. TPA yang dimiliki Kabupaten Trenggalek ada dua yaitu TPA Bengkorok dan TPA Srabah. Adapun sistem pengolahan sampahnya dilakukan dengan sistem *open dumping*. Untuk TPA Srabah, sampah organik sebagian diolah menjadi pupuk kompos. Untuk sampah anorganik sebagian dikelola kembali oleh pengrajin dan lainnya.

Proses pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis, 2015

GAMBAR 2.
PROSES PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TRENGGALEK

PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TRENGGALEK

Analisis peran kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek difungsikan untuk melihat peran masing-masing kelembagaan pengelolaan persampahan. Rangkuman hasil analisis peran kelembagaan dalam pengelolaan sampah dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 2.
HASIL ANALISIS COSSTAB PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN TRENGGALEK

No	Peran	Pernyataan	Kelembagaan		Nilai chi square	Sig chi square	Keterangan
			Pemerintah	Masy.			
1	Adanya lembaga pengelola sampah	Ya	30	54	8.163	0,004	Ada hubungan antara kelembagaan dengan keberadaan lembaga pengelola sampah
		tidak	0	16			

2	Upaya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	Ya	30	49	11.392	0,001	Ada hubungan antara kelembagaan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah
		tidak	0	21			
3	Pengembangan teknologi persampahan	Ya	30	20	42.857	0,000	Ada hubungan antara kelembagaan dengan pengembangan teknologi persampahan
		tidak	0	50			
4	Cara untuk pengurangan sampah oleh pemerintah	Ya	30	34	24.107	0,000	Ada hubungan antara kelembagaan dengan cara untuk pengurangan sampah oleh pemerintah
		tidak	0	36			
5	Pemanfaatan sampah	Ya	30	46	13.534	0,000	Ada hubungan antara kelembagaan dengan pemanfaatan sampah
		tidak	0	24			
6	Pelaksanaan pengelolaan sampah	Ya	25	23	21.436	0,000	Ada hubungan antara kelembagaan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah
		tidak	5	47			
7	Lemahnya pemenuhan kelengkapan prasaranan dan sarana	Ya	14	53	8.014	0,005	Ada hubungan antara kelembagaan dengan lemahnya pemenuhan kelengkapan prasarana dan sarana
		tidak	16	17			
8	Pemerintah memfasilitasi pengelolaan sampah	Ya	30	31	27.400	0,000	Ada hubungan antara kelembagaan dengan peran pemerintah untuk memfasilitasi pengelolaan sampah
		tidak	0	39			
9	Koordinasi antar lembaga pengelolaan sampah secara baik	Ya	7	8	61.144	0,000	Ada hubungan antara kelembagaan dengan koordinasi antar lembaga pengelolaan sampah secara baik
		tidak	23	62			

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Berdasarkan tabel diatas bahwa adanya hubungan kelembagaan dalam pengelolaan sampah, kelembagaan sangat berperan dalam berbagai hal yaitu, kelembagaan sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan teknologi persampahan. Selain itu keberadaan kelembagaan juga sangat berubungan dengan pemanfaatan sampah, pengelolaan sampah, menjamin tersedianya sarana prasana persampahan serta memfasilitasi pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek. dengan adanya hubungan kelembagaan dalam pengelolaan sampah akan mampu mengoptimalkan pengeleloan sampah yang ada.

Untuk mengetahui seberapa besar peran kelembagaan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, maka akan dilakukan pendekatan rentang skala. Rentang skala diukur berdasarkan jawaban responden atas peran pemerintah, peran masyarakat, peran swasta dan peran LSM dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

Peran Pemerintah

TABEL 3.
HASIL RENTANG SKOR PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Variabel		Alternatif Jawaban					Total Sampel	Total Skor Indikator	Rata – rata Indikator
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)			
Yi	y1.1	16	71	5	4	4	100	391	3,91
Peran Pemerintah	y1.2	8	60	20	8	4	100	360	3,60
	y1.3	11	42	35	10	2	100	350	3,50
	y1.4	17	48	21	14	0	100	374	3,67
	y1.5	25	44	21	8	2	100	382	3,82
	y1.6	7	41	22	24	6	100	319	3,19
	y1.7	26	33	23	17	1	100	366	3,66
	y1.8	13	56	18	11	2	100	367	3,67
	y1.9	7	39	30	20	4	100	325	3,25
	y1.10	17	30	23	23	7	100	327	3,27

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Keterangan: Tidak Berperan: 10-22

Cukup Berperan:23-35

Sangat Berperan:36-50

Hasil skor tabel diatas menunjukkan bahwa nilai skor peran pemerintah dalam pengelolaan persampahan sebanyak 35,54 (dibulatkan 36) sehingga masuk dalam klasifikasi sangat berperan. Artinya sebagian besar responden menyatakan bahwa pemerintah sangat berperan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah sangatlah penting, karena pengelolaan sampah yang baik merupakan wujud dari bentuk pelayanan infrastuktur kota kepada masyarakat

Peran Masyarakat

TABEL 4.
HASIL RENTANG SKOR PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Variabel		Alternatif Jawaban					Total Sampel	Total Skor Indikator	Rata – rata Indikator
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)			
Y2	y2.1	14	58	11	15	2	100	367	3,67
Peran Masyarakat	y2.2	21	55	16	8	0	100	386	3,90
	y2.3	9	45	29	12	5	100	341	3,41
	y2.4	12	46	20	20	2	100	346	3,46
	y2.5	9	42	24	21	4	100	331	3,31

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Keterangan: Tidak Berperan: 5-11

Cukup Berperan:12-18

Sangat Berperan:19-25

Hasil skor tabel diatas menunjukkan bahwa nilai skor peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebanyak 17,75 sehingga masuk dalam klasifikasi cukup berperan. Artinya sebagian besar responden menyatakan bahwa masyarakat cukup berperan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek.

Keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya bertumpu pada peran pemerintah saja, akan tetapi melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sebagai sumber penghasil sampah rumah tangga, harus turut membantu pemerintah dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan menaruh sampah pada wadah tertutup, sehingga tidak menjadi sumber lalat atau binatang lain dan tidak menimbulkan bau. Selain itu, masyarakat dapat berperan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, dapat memilah sampah organik dan anorganik saat membuang sampah.

Peran masyarakat melalui kelompok PKK diharapkan dapat mengelola atau mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang yang lebih bermanfaat dan menghasilkan nilai ekonomis. Masyarakat juga dapat memanfaatkan sampah menjadi pupuk dengan melakukan proses komposisasi untuk tanaman di sekitarnya.

Peran Swasta

TABEL 5.
HASIL RENTANG SKOR PERAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Variabel		Alternatif Jawaban					Total Sampel	Total Skor Indikator	Rata – rata Indikator
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)			
Y3	y3.1	28	51	17	4	0	100	403	4,03
Peran swasta	y3.2	30	53	10	7	0	100	406	4,06
	y3.3	27	57	10	5	1	100	404	4,04
	y3.4	28	57	7	8	0	100	405	4,05
									16,18

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Keterangan: Tidak Berperan: 4-9 Cukup Berperan:10-14

Sangat Berperan:15-20

Hasil skor tabel diatas menunjukkan bahwa nilai skor peran swasta dalam pengelolaan persampahan sebanyak 16,18 sehingga masuk dalam klasifikasi sangat berperan. Artinya sebagian besar responden menyatakan bahwa swasta sangat berperan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek. Walaupun dalam kenyataannya pihak swasta belum melakukan peran dalam pengelolaan sampah.

Peran swasta sangat dibutuhkan dalam pengelolaan persampahan. Dengan keberadaan swasta dalam pengelolaan sampah dapat membantu meringankan beban pemerintah. Peran swasta dalam pengelolaan sampah dapat berdampak pada positif terhadap pengelolaan sampah kota, karena setidaknya keberadaan pihak swasta mampu menjawab permasalahan yang di hadapi pemerintah sehingga tercipta kondisi pengelolaan sampah yang ideal.

Peran LSM

TABEL 6.
HASIL RENTANG SKOR PERAN LSM DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Variabel		Alternatif Jawaban					Total Sampel	Total Skor Indikator	Rata – rata Indikator
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)			
Y4	y4.1	25	50	9	16	0	100	384	3,84
Peran LSM	y4.2	20	54	9	17	0	100	377	3,77
	y4.3	19	56	13	11	1	100	381	3,81
	y4.4	19	53	17	11	0	100	380	3,80
	y4.5	22	58	10	10	0	100	392	3,92
									19,14

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Keterangan

Tidak Berperan: 5-11

Cukup Berperan:12-18

Sangat Berperan:19-20

Hasil skor tabel diatas menunjukkan bahwa nilai skor peran LSM dalam pengelolaan persampahan sebanyak 19,14 sehingga masuk dalam klasifikasi sangat berperan. Artinya sebagian besar responden menyatakan bahwa LSM sangat berperan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek. Walaupun dalam kenyataannya tidak ada LSM yang turut dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek, namun sebagian besar responden percaya bahwa keberadaan LSM dalam pengelolaan persampahan akan meningkatkan pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek. Keberadaan LSM dapat dijadikan kontrol terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, sehingga kegiatan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

HUBUNGAN ANTAR KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

TABEL 7.
HASIL UJI KORELASI ANTAR KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN TRENGGALEK

No	Variabel	Pearson Correlation	Sig	Patokan untuk hasil korelasi	Keterangan
1	Peran pemerintah dan peran masyarakat	0,237	0,017	0,20-0,040 :Hubungan ada tetapi rendah	Hubungan ada tetapi rendah dan signifikan
2	Peran pemerintah dan Peran swasta	-0,123	0,223	<0,20: Hubungan dapat dianggap tidak ada	Tidak ada hubungan yang signifikan
3	Peran Pemerintah dan LSM	0,035	0,733	<0,20: Hubungan dapat dianggap tidak ada	Tidak ada hubungan yang signifikan
4	Peran masyarakat dengan swasta	0,185	0,065	<0,20: Hubungan dapat dianggap tidak ada	Tidak ada hubungan yang signifikan
5	Peran masyarakat dengan LSM	0,098	0,333	<0,20: Hubungan dapat dianggap tidak ada	Tidak ada hubungan yang signifikan
6	Peran swasta dengan LSM	0,535	0,000	>0,40-0,70: hubungan cukup	Hubungan cukup dan signifikan

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara peran pemerintah dan peran masyarakat, dengan besarnya korelasi sebesar 0,237 berarti ini menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara pemerintah dan swasta tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan persampahan, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya secara sendiri, tanpa adanya peran masyarakat. Namun hubungan yang rendah menunjukkan belum adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek. Untuk itu pemerintah harus memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek.

Untuk hubungan pemerintah dengan pihak swasta maupun LSM hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat antara pemerintah dengan pihak swasta maupun LSM dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek. Hal ini dipengaruhi kondisi bahwa di Kabupaten Trenggalek pihak swasta maupun LSM tidak ada yang ikut serta dan berperan dalam pengelolaan persampahan, sehingga tidak ada hubungan antara pihak pemerintah dan swasta maupun LSM dalam pengelolaan persampahan. Pengelolaan persampahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah.

Hasil analisis untuk peran masyarakat dan swasta maupun LSM menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan peran masyarakat dan swasta maupun LSM dalam pengelolaan persampahan. Hal ini karena peran swasta dalam pengelolaan sampah tidak dirasakan oleh pihak masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Pihak swasta belum memberikan peran yang besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek. Begitu juga dengan LSM yang tidak dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

Tidak adanya LSM yang aktif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek karena menganggap bahwa Kabupaten Trenggalek belum memiliki permasalahan sampah yang besar, dan masih dapat ditangani oleh pihak pemerintah. Permasalahan persampahan di Kabupaten Trenggalek bukan permasalahan yang bersifat antar wilayah ataupun nasional, yang harus diselesaikan dengan secepatnya, sehingga permasalahan pengelolaan persampahan diserahkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah setempat.

Sedangkan untuk hubungan peran dan swasta menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara peran swasta dan LSM. Meskipun dalam kondisi saat ini belum terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek, harapan masyarakat ke depan tentang peran swasta dan LSM dalam pengelolaan sampah sangat besar guna tercapainya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa swasta harus berperan aktif dengan cara harus menyiapkan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan, melaksanakan kegiatan 'take-back' guna ulang dan daur ulang terhadap produk bekas.

Pihak swasta harus mengelola limbah secara berwawasan lingkungan, dan pihak swasta harus memberi informasi yang jujur kepada konsumen melalui label dan laporan. Sedangkan LSM berperan dalam hal mempromosikan kegiatan-kegiatan positif 3R dalam level masyarakat, mempromosikan peningkatan kesadaran masyarakat, menyiapkan/melakukan training dan sosialisasi. LSM juga berperan dalam memantau upaya-upaya yang dilakukan oleh kegiatan bisnis dan pemerintah. Dan berperan dalam memberikan masukan kebijakan yang sesuai.

TEMUAN PENELITIAN

Temuan penelitian dari penelitian ini adalah di Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan sampahnya hanya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, swasta dan LSM belum berperan dalam pengelolaan sampah. Dengan kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek belum optimal, karena tidak semua kelembagaan yang ada ikut berperan dalam pengelolaan sampah. Peran masing-masing kelembagaan dalam pengelolaan sampah perkotaan sangatlah penting, karena dari masing-masing kelembagaan akan menempati posisi masing-masing. Peran kelembagaan merupakan kunci sukses keberhasilan dalam pengelolaan sampah.

Sinergitas antar kelembagaan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan pengelolaan yang baik guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Hal ini seperti yang diungkapkan Aboejoewono (1985) Aboejoewono (1985) menyatakan bahwa perlunya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu: 1. Penerapan teknologi yang tepat guna 2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3. Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah 4. Optimalisasi TPA sampah 5. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kelembagaan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Trenggalek belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ada karena belum optimalnya peran kelembagaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peran dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada peran pemerintah dan masyarakat, belum adanya peran swasta maupun LSM yang terlibat dalam pengelolaan juga mempengaruhi pola pengelolaan sampah yang ada.

Dengan belum adanya peran LSM maupun swasta dalam pengelolaan sampah, menjadikan semua peran dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan serta pemrosesan sampah. Dalam hal ini masyarakat hanya berperan pada sebatas penyediaan sarana dan prasarana saja. Kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Seharusnya dalam pengelolaan sampahnya guna meningkatkan peran kelembagaan yang ada pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melihat apa yang terjadi di Kota Surabaya. Kota Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia yang dinilai mampu mengelola sampah dengan baik, melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*). Tidak hanya itu, Program 3R dinilai telah menjadi landasan upaya pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat, dalam rangka mengurangi sampah dan mengambil nilai ekonomis dari sampah (Riski, 2014).

Berdasarkan pengalaman Kota Surabaya kunci sukses dalam pengelolaan sampahnya menurut Risma dalam Riski (2014) adalah adanya partisipasi dari masyarakat, artinya bukan masyarakat saja, termasuk media juga sangat berperan. Selain partisipasi masyarakat, gerakan pengurangan sampah juga diterapkan di sekolah melalui program *Eco School*. Edukasi kepada anak-anak usia sekolah menjadi salah satu langkah penting menanamkan budaya 3R di masyarakat, sehingga masyarakat semakin banyak yang sadar

akan pentingnya mengurangi sampah pribadi, karena hingga kini sampah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah perkotaan. Pengolahan sampah mulai dari rumah tangga, tempat pembuangan sementara di kampung-kampung, hingga di tempat-tempat umum menjadi langkah yang efektif untuk mengurangi volume sampah.

Upaya pengurangan sampah dengan model 3R oleh masyarakat, telah dilakukan sejak dari rumah sehingga sangat membantu menekan jumlah sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah.

Dengan melihat kondisi yang ada di Kota Surabaya tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek, dimana dalam pengelolaan sampah peran kelembagaan dari sektor masyarakatlah yang mempunyai peran utama dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini artinya peran aktif masyarakat sangat berperan guna menyelesaikan masalah persampahan yang ada.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan masih kurangnya fasilitas pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek sehingga pengelolaan persampahan belum berjalan dengan efektif. Oleh karenanya perlunya merencanakan penambahan fasilitas pengelolaan persampahan dengan baik, dengan mengatur anggaran, menambah fasilitas dan tenaga kebersihan.
2. Perlunya pemerintah memotivasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dalam menerapkan 3R untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan
3. Perlunya lembaga lainnya seperti swasta dan LSM dalam pengelolaan sampah, mengingat peran swasta dan LSM terbukti memiliki korelasi yang tinggi dan peran yang besar dalam pengelolaan persampahan.
4. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan kajian mengenai pengelolaan sampah di lihat dari aspek kelembagaan maupun aspek operasional guna mengoptimalkan pengelolaan yang ada, khususnya untuk Kabupaten Trenggalek.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboejoewono, A. 1985. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya; Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus*. Jakarta
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Trenggalek, 2012:15
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. 2010. *Pengelolaan Sampah*. Diktat Kuliah TL-3104. Program Studi Teknik Lingkungan. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Edisi Semester 2010/2011. www.html.itb.ac.id/wordpress/wp.../DiktatSampah-2010.pdf
- Ikhsandri, Reini S. Ilmiaty dan Nyimas Septi R.P. 2014. *Kajian Infrastruktur Pengolahan Sampah Di Kawasan Berkembang Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang*. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan. Vol 2. No. 1. Maret 2014. ISSN. 2355-374X. Hal 137-145.pdf.
- Nasution, Rozaini. 2003. *Teknik Sampling*. 2015. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara *digital library*

Pokja Kabupaten Trenggalek . 2015.

Rizky, Ahmad. 2013. *Pengertian Positivisme*.
<http://blogkilas.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-positivisme.html> (di unduh pada tanggal 10 Januari 2016

_____ . 2013. *Trenggalek Dalam Angka. Kabupaten Trenggalek*

Widodo, Joko dan Yulina Trihadiningrum. 2007. *Evaluasi Sistem Pembuangan Akhir Sampah Di Kota Trenggalek*. Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi V. Program Studi MMT-ITS. Surabaya 3 Pebruari 2007. Hal 1-8.pdf.